BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bandung

3.1.1.1 Aspek Geografis dan Demografi Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung, yang beribukota di Kecamatan Soreang, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berada di dataran tinggi. Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April tahun 1641 M. Awalnya, Kabupaten Bandung terdiri atas 33 Kecamatan. Sejak disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, pemekaran daerah marak terjadi di Indonesia, demikian juga di Kabupaten Bandung. Kota Cimahi memekarkan diri dari Kabupaten Bandung pada tahun 2001, yang kemudian disusul dengan pemekaran Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2007. Sehingga pada tahun 2010 terdapat 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung yang terbagi atas 8 Wilayah Pengembangan (WP).

Tabel 3.1
Wilayah Pengembangan di Kabupaten Bandung

NO	WILAYAH PENGEMBANGAN (WP)	KECAMATAN
1	WP Soreang	1. Kecamatan Soreang 2. Kecamatan Kutawaringin 3. Kecamatan Katapang 4. Kecamatan Rancabali 5. Kecamatan Pasirjambu 6. Kecamatan Ciwidey

2	WP Baleendah	1. Kecamatan Baleendah 2. Kecamatan Dayeuhkolot 3. Kecamatan Bojongsoang
3	WP Banjaran	1. Kecamatan Banjaran 2. Kecamatan Pengalengan 3. Kecamatan Cangkuang 4. Kecamatan Cimaung 5. Kecamatan Arjasari 6. Kecamatan Pameungpeuk
4	WP Majalaya	1. Kecamatan Majalaya 2. Kecamatan Ciparay 3. Kecamatan Pacet 4. Kecamatan Kertasari 5. Kecamatan Paseh 6. Kecamatan Ibun 7. Kecamatan Solokan Jeruk
5	WP Cicalengka	1. Kecamatan Cicalengka 2. Kecamatan Nagreg 3. Kecamatan Cikancung
6	WP. Cileunyi	1. Kecamatan Cileunyi 2. Kecamatan Rancaekek
7	WP Cimeunyan-Cilengkrang	1. Kecamatan Cimenyan 2. Kecamatan Cilengkrang
8	WP Margaasih-Margahayu	1. Kecamatan Margaasih 2. Kecamatan Margahayu

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 7 Tanggal 20 Juni 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.

3.1.1.2 Karakteristik Wilayah Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah sebesar 176.238,67 ha, yang terdiri atas 31 Kecamatan 267 Desa dan 9 Kelurahan. Kecamatan Pasirjambu merupakan wilayah dengan luas terbesar dan Kecamatan Margahayu merupakan wilayah dengan luas terkecil di Kabupaten Bandung.

Batas wilayah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang

Sebelah Timur : Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut

Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur

Sebelah Barat : Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi

Secara geografis, Kabupaten Bandung terletak pada 6°49'–7°18' Lintang Selatan dan 107°14'–107°56' Bujur Timur. Letak geografis wilayah Kabupaten Bandung di bagian timur dan selatan cekungan Bandung yang merupakan tubir danau purba dengan tipe geologis berbentuk kandungan batuan vulkanis. Kabupaten Bandung merupakan hulu daerah aliran sungai Citarium, dengan beberapa anak sungainya, seperti sungai Citarik, Cikeruh, Cirasea, Cisangkuy, Ciwidey, dan Cimahi. Keberadaan sungai-sungai ini menguntungkan bagi masyarakat sebagai sumber air bersih, juga bagi sektor pertanian dan industri.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan atau daerah perbukitan dengan ketinggian 500–1.800 meter di atas permukaan laut, semakin terjal kearah selatan. Ketinggian tersebut sangat mempengaruhi suhu udara di Kabupaten Bandung sehingga suhunya cukup sejuk yaitu 12 ^{0} *Celcius* – 21 ^{0} *Celcius*. Pegunungan yang terdapat di Kabupaten Bandung adalah Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 meter, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 meter, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 meter.

Kelembaban udara di Kabupaten Bandung berkisar antara 78% pada musim hujan dan 70% pada musim kemarau. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata tahunan bervariasi antara 1.500 mm – 4.000 mm. Daerah di sekitar Soreang-Katapang

bercurah hujan 2000 mm pertahun, curah hujan rata-rata 3000 mm pertahun di daerah Cicalengka, Soreang hingga Majalaya, curah hujan rata-rata 3500 mm pertahun di daerah Ciwidey hingga Pangalengan dan lebih dari 4000 mm per tahun di sekitar Gunung Patuha. Curah hujan rata-rata bulanan yang relatif paling basah lebih dari 2000 mm terjadi pada bulan November hingga April, sedangkan curah hujan rata-rata bulanan yang relatif kering di bawah 2000 mm terjadi pada bulan Mei hingga Oktober.

3.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bandung

Morfologi wilayah Kabupaten Bandung terdiri atas: wilayah datar/ landai, perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0–8%, 8–15% hingga di atas 45%. Kondisi alam tersebut menyebabkan Kabupaten Bandung rentan dengan bencana alam, baik berupa banjir, longsor, erosi dan lain sebagainya.

Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terutama dalam pemanfaatan lahan untuk pertanian di daerah perbukitan dengan kemiringan tertentu serta alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian menyebabkan terjadinya pergerakan tanah (longsor), erosi dan sedimentasi serta bertambahnya lahan kritis di Kabupaten Bandung. Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman juga menyebabkan terganggunya sistem jaringan irigasi dan drainase.

Dampak perubahan guna lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung adalah timbulnya genangan dan kejadian banjir di beberapa titik terutama wilayah

permukiman seperti banjir di Cieunteung–Baleendah, Dayeuhkolot serta jalan terusan Kopo. Dibeberapa tempat terutama daerah perkotaan di Kabupaten Bandung, saluran irigasi berubah fungsi menjadi saluran drainase. Sementara untuk penanganan limpasan air ke badan jalan, telah diupayakan pembangunan saluran drainase di 14 ruas jalan sepanjang 6.494,56 m, yang selanjutnya perlu perhatian terkait pemeliharaan saluran tersebut agar limpasan air ke badan jalan dapat diminimalkan.

Kondisi lingkungan yang kurang baik di daerah hulu, terutama terkait dengan fungsi resapan air, menyebabkan sedimentasi dan banjir di daerah hilir. Kondisi tersebut diperparah dengan makin tingginya tingkat alih fungsi lahan menjadi permukiman serta perilaku masyarakat yang kurang baik dalam menjaga lingkungan, terutama terkait dengan pengelolaan sampah. Berikut Gambar 3.1 wilayah rawan bencana di Kabupaten Bandung sebagai berikut :

3.1.1.4 Wilayah Kecamatan Baleendah

Kecamatan Baleendah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung. Berdasarkan letak astronomisnya Kecamatan Baleendah terletak pada 1070.46'.35,5" sampai 1070.52'.49,4" BT dan 60.58'.24,4" sampai 70.02'.50,9" LS. Secara administratif Kecamatan Baleendah berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Bojong Soang
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Arjasari
3. Sebelah Barat : Kecamatan Dayeuhkolot
4. Sebelah Timur : Kecamatan Ciparay

Kecamatan Baleendah memiliki luas 41,56 KM^2 yang terletak pada ketinggian sekitar 680 mdpl sampai 715 mdpl dan dibagi menjadi 5 kelurahan 3 desa. Jarak ke Ibu kota Kabupaten yaitu 18 km dan ke Ibu kota Provinsi 16 Km. Populasi penduduk seluruh masyarakat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dengan jumlah 192.480 jiwa dengan jumlah kepadatan penduduk 4.631 jiwa per KM^2. Daerah- daerah yang terkena dampak bencana banjir di Wilayah Kecamatan Baleendah dapat di lihat pada Tabel 3.2 dan Gambar 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk di Kecamatan Baleendah Yang Terkena Bencana Banjir Tahun 2012

No	Desa/ Kelurahan	Wilayah RW	Ketinggian Air	Jumlah Penduduk	
				KK	Jiwa
1	Baleendah	09, 19, 20, 21, dan 28	50-170 cm	734	2.052
2	Andir	01,02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, dan 13	30-130 cm	2.787	8.034
TOTAL				3521	10086

Sumber : BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2012

3.1.1.5 Sejarah Bencana Banjir Sungai Citarum

Sejarah mencatatkan sungai Citarum merupakan sumber penghidupan masyarakat di tanah sunda sejak masa prasejarah. Berbagai fenomena yang berkembang melalui legenda rakyat diceritakan secara turun menurun, mulai dari meletusnya Gunung Jaya giri yang kemudian menjadi cikal bakal Gunung Sunda, yang pada akhirnya meletus membuat kaldera sebagai landasan dasar terbentuknya Gunung Tangkuban parahu. Hasil letusan gunung sunda tersebut menyumbat aliran sungai Citarum sehingga pada ribuan tahun yang lalu terbentuklah danau bandung purba kejadian-kejadian tersebut diceritakan melalui legenda masyarakat, contohnya Sasakala Sangkuriang-Dayang Sumbi-Tangkuban parahu.

Seorang peneliti pada jaman kolonial tertarik dan merekonstruksi sasakala tersebut secara ilmiah (Baca: *Van Bemmelen-The Geology Of Indonesia*). Danau Bandung Purba itu akhirnya bobol di daerah perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (Curug Jompong) dan menyisakan aliran sungai terpanjang di Provinsi Jawa Barat yaitu Sungai Citarum. Mengalir dari beberapa mata air di selatan Bandung, sungai Citarum melewati Kawasan Cekungan Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, dan bermuara di Kabupaten Karawang-Kabupaten Bekasi. Sungai Citarum pada masa dahulu masih terjaga keasrian dan kelestariannya, namun sejarah mencatat bahwa pada masa itu Citarum sudah mengalami banjir dibeberapa daerahnya, terutama pada musim hujan. Pada tahun 1810, Bupati Bandungsaat itu, R.A Wiranatakusuma II

memindahkan ibu kota Bandung dari daerah Krapyak (Dayeuh Kolot) ke daerah Bandung tengah hingga saat ini.

Banjir dan longsor pada suatu kawasan DAS menunjukkan bahwa DAS merupakan suatu ekosistem yang mengalami kerusakan. Kondisi inilah sebenarnya yang mengganggu kelestarian sungai. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari mediacetak (terutama Kompas dan Pikiran Rakyat), wilayah yang terlanda banjir berturut-turut adalah wilayah Kecamatan Cikancung (meliputi Desa Ciluluk), Majalaya (meliputi Desa Bojong, Majalaya, Majakerta, Majasetra, Sukamaju), Baleendah (meliputi Kelurahan Andir, Kelurahan Baleendah) dan Dayeuhkolot (meliputi Desa Citeureup, Cangkuang Wetan, Dayeuhkolot). Berikut ini adalah tabel kronologis banjir yang terjadi akibat luapan Sungai Citarum.

Tabel 3.3
Koronologis Bencana Banjir Citarum

Tahun	Dampak Luapan
1931	Para ahli memperkirakan bahwa banjir besar yang terjadi tahun 1931 merupakan banjir paling besar dengan luas genangan sekitar 9.300 ha di wilayah Cekungan Bandung.
1977	Tanggul Sungai Citarum di Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang jebol. Beberapa desa di Kecamatan Batu Jaya dan Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirtajaya terendam banjir.
1983	Daerah yang tergenang luapan Citarum di Cekungan Bandung mencapai 13.000 ha.
1984	Luas genangan luapan Citarum di cekungan Bandung mencapai 47.000 ha. Banjir tahun ini menyebabkan 21.560 jiwa warga Bandung Selatan harus mengungsi. Sedangkan di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi Utara banjir menggenangi 3.000 hektar lahan yang terdiri dari pemukiman, sawah tadah hujan dan pertambakan. Area pertambakan adalah yang paling luas terkena banjir. Akibat banjir ini pula 1.626 jiwa (400 KK) penduduk asal Kelurahan Baleendah, Manggahang dan Jelekong Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung di pindahkan ke Cimuncang.
1985	Banjir besar tahun 1985 melanda kawasan Baleendah, Bojongsari, Sapan, dan Dayeuhkolot, yang melumpuhkan berbagai sektor

	perekonomian, transportasi, perikanan, dan pertanian di kawasan Bandung Selatan.
1986	Pada bulan Maret 20.000 rumah di 10 desa yang berada di 10 Kecamatan wilayah Bandung Selatan terendam air. Luas genangan mencapai 7.500 ha. Sebanyak 68.635 jiwa menderita, 38.672 di antaranya mengungsi dan 5 orang tewas. Kerugian di taksir mencapai Rp 10 miliar. Untuk mengamankan warga dari bahaya banjir, 500 warga tigadesa, yakni Dayeuhkolot, Andir, dan Baleendah, direlokasi ke Kampung Riunggunung, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, namun mereka kemudian memutuskan kembali ke tempat tinggal semula.
1992	Banjir melanda Kabupaten Bandung sejak bulan Desember 1991 hingga April 1992. Rumah yang tergenang air sebanyak 28.026 buah dan kebanyakan berada di wilayah Kecamatan Rancaekek, Majalaya, Bojongsoang, Katapang, dan Pameungpeuk.
1993	Banjir masih menghampiri kawasan Kabupaten Bandung. Di Dayeuhkolot ketinggian airmencapai 1-2,5 m, sedangkan Kecamatan Majalaya terendam air lebih dari 8 hari.
2002	Luapan Citarum menggenangi kawasan Bandung Selatan, dengan ketinggian air 0,5 – 2 m.Banjir sempat menggenangi 2.676 rumah yang dihuni 4.073 KK (14.962 jiwa), di tiga Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandung. Tak ada korban jiwa dalam bencana alam tersebut.
2005	Di Kecamatan Baleendah, banjir merendam sedikitnya 435,5 hektar sawah. Di Kecamatan Dayeuhkolot, sawah yang terendam mencapai 25 hektar dengan usia tanam padi antara7-10 hari. Ketinggian banjir di dua Kecamatan itu tercatat mencapai 2,5 meter. Luas genangan banjir Citarum 1.119 ha.
2007	Terjadi banjir yang menggenangi kawasan permukiman di Bandung selatan, terutama Kecamatan Dayeuhkolot, Majalaya, Banjaran, Pameungpeuk, dan Baleendah. Luas genangan di Kabupaten Bandung mencapai 2.701 ha.
2008	Banjir besar terjadi pada bulan Maret, April, November, Desember. Wilayah yang paling parah dilanda banjir adalah daerah-daerah di Kabupaten Bandung . 4.523 rumah yang ada di 4 desa terendam air dengan ketinggian 0,5-2 meter. Luas genangan mencapai 2.701 ha.
2009	Di awal tahun, 12 Kecamatan di Kabupaten Bekasi tergenang banjir dengan Ketinggian air mencapai 70 cm-2,5 meter. Banjir pun singgah di Cieunteung, Kelurahan/Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Di daerah ini ketinggian air 60 cm hingga lebih dari 1,5 meter.
2010	Februari 2010, pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang kebanjiran sepekan terakhir masih akan dilakukan hingga air surut. Selain menghindari kerusakan infrastruktur yang lebih parah, langkah ini juga ditempuh Perusahaan Listrik Negara (PLN) demi keselamatan masyarakat luas. Pemutusan

	aruslistrik dilakukan apabila genangan mencapai sekitar 70 sentimeter di atas permukaan tanah. Parameter itu diambil mengacu ketinggian papan hubung bagi (PHB) di masing-masing gardu distribusi tiang portal setinggi 1,2 meter. Berdasarkan data PLN DJBB, selama terjadi banjir, pemadaman dilakukan di empat gardu distribusi yang mengaliri listrik ke Kampung Cieunteung, Cigado, Cigosol, Muara, Jambatan, Ciputat, dan Uak.Semuanya di Kecamatan Baleendah. Total pelanggan yang arus listriknya dipadamkanakibat banjir 1.863 rumah tangga, dengan keseluruhan pemakaian listrik mencapai 28.975 kWh. Pemadaman listrik di Kampung Cieunteung terdiri dari 157 pelanggan dengan total pemakaian 7.466 kWh. Adapun aliran listrik di wilayah lain sudah tersambung lagi karena air surut.
2011	Kecamatan Baleendah, khususnya di Kp. Cieunteung, Kelurahan Baleendah dan Kp. Cigosol, Kelurahan Andir, Mei 2011, kembali direndam banjir. Sejak Senin dini hari, air setinggi 2 meterhingga 3 meter merendam sekitar 5.300 rumah di kawasan tersebut. Luapan banjir Cieunteung kembali memutuskan jalur Jl. Anggadireja, Baleendah menuju arah Ciparayatau Majalaya. Badan Jln. Anggadireja sepanjang sekitar 300 meter yang melewati Kp. Cieunteung tergenang banjir setinggi 50 cm, sehingga menyulitkan kendaraan bermotor lewat. total rumah yang terendam sebanyak 5.317 rumah. Terdiri dari 2.074 rumah di KelurahanBaleendah dan 3.245 rumah di Kelurahan Andir. Petugas lapangan sudah mengevakuasi 90 kepala keluarga (KK) atau sekitar 286 jiwa. Mereka sebagian besar tinggal di Kp.Cieunteung, Kelurahan Baleendah dan Kp. Cigosol, Kelurahan Andir. Korban banjir di Kp. Cieunteung sebanyak 43 kepala keluarga (KK) atau 147 jiwa, sebanyak 40 KK atau 129 jiwa ditampung di tenda RW 28. Sedangkan 7 KK atau 19 jiwa dari Kp. Cigosol, Kelurahan Andir ditampung di aula kantor Kecamatan Baleendah.
2012	Bencana banjir akibat hujan deras di wilayah kampung Cieunteung Kelurahan Baleendah sehingga 3 Rw (Rw 09, 20,dan 28), rumah warga terendam dengan ketingian air 50 cm sampai dengan 170 cm. Sedangkan di wilayah kelurahan andir 10 Rw (01,02,03,05,06,07,08,09 dan 10) rumah warga terendam dengan ketinggian air 30 cm sampai dengan 150 cm. Di Kelurahan Baleendah rumah yang terendam 734 KK - 2.052 jiwa. Dikelurahan Andir rumah yang terendam 2.787 KK- 8.034 jiwa. Korban dievakuasi ke tempat yang aman (GOR Baleendah 66 KK 226 jiwa, Tenda Pengungsian di Rw 28, 2 KK 10 jiwa, Bangunan Paud Rw 02, 18 KK 74 jiwa dan Gedung Kwarcab Pramuka 25 KK 111 jiwa dari Rw 09 Kelurahan Andir).

Sumber : http://www.scribd.com/doc/58813499/Paper-Bencana-Banjir-Bandung-Selatan dan BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2012.

3.1.2 Latar Belakang Terbentuknya BPBD Kabupaten Bandung

Letak dan kondisi geografis, geologis dan demografis wilayah Kabupaten Bandung rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Rangkaian bencana yang dialami Kabupaten Bandung, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. Dibutuhkan pengembangan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah. Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah:

1. Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi.
3. Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana.

Berbagai kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pendirian Badan Penggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

3.1.2.1 Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bandung

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung :

"Terwujudnya Kabupaten Bandung Siaga dan Sabilulungan Dalam Menghadapi Bencana".

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung :

1. Meningkatkan pengurangan resiko bencana dijadikan sebagai prioritas daerah dengan didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat, budaya dan kearifan lokal.
2. Melakukan identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana dan memperkuat peringatan dini.
3. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan terhadap bencana di semua tingkatan.
4. Mengurangi faktor utama penyebab bencana
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk menjamin pelaksanaan tanggap darurat yang efektif.
6. Membangun sistem manajemen logistik yang profesional.
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana yang terkoordinasi dan terpadu bersama-sama dengan *stakeholder* masyarakat disemua tataran dan sektor untuk mengendalikan resiko bencana baik pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat atau pemulihan dan rekonstruksi.

3.1.2.2 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Bandung

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh

Sekretaris Daerah. Tugas pokok BPBD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
3. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

BPBD Kabupaten Bandung selain mempunyai tugas pokok, juga mempunyai fungsinya adalah sebagai berikut :

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

3.1.3 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Bandung

Struktur organisasi dalam suatu dinas maupun instansi-intansi pada suatu organisasi sangat diperlukan keberadaannya. Struktur organisasi ini dapat dijadikan pedoman dalam pembagian tugas oleh setiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing agar lebih mengarah pada pelaksanaan pedoman kerja yang telah disusun sebelumnya. Struktur organisasi BPBD Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 3.3 sebagai berikut :

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Bandung dalam Gambar 3.3 merupakan suatu hal yang vital di BPBP Kabupaten Bandung. Organisasi yang terjalin akan membuahkan proses penyelenggaraan tugas maupun kewajiban aparatur yang maksimal. Susunan organisasi di BPBD Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Susunan organisasi BPBD, terdiri dari :

1. Kepala BPBD;
2. Unsur Pengarah, terdiri dari :
   a. Ketua;
   b. Anggota.
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
   a. Kepala Pelaksana;
   b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
      1) Sub Bagian Penyusunan Program;
      2) Sub Bagian Umum;
      3) Sub Bagian Keuangan
   c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
      1) Seksi Pencegahan Bencana;
      2) Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
   d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
      1) Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
      2) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :

1) Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana;

2) Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana.

4. Bagan struktur organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

5. Unsur Pengarah

(1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi:

a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

b. memantau; dan

c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

(2) Keanggotaan unsur pengarah terdiri atas:

a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan

b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

(3) Keanggotaan unsur pengarah dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas.

(1) Unsur pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

(2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yan membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD.

(3) Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, yang meliputi :

a. pra bencana;

b. saat tanggap darurat;

c. pasca bencana.

7. Dalam menyelenggarakan tugas, BPBD mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian, Fungsi koordinasi merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

b. Pengkomandoan; Fungsi komando merupakan fungsi komando unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah–langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

c. Pelaksana. Fungsi pelaksana merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada

di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang–undang.

3.1.4. Gambaran Penanggulangan Bencana Banjir Di Wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

1. Pra Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi,

1. Dalam situasi tidak terjadi bencana, meliputi :
    a. Pengurangan risiko bencana
    b. Pencegaan
    c. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan
    d. Persyaratan analisi risiko bencana

e. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang

f. Pendidikan dan pelatihan

g. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

2. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, meliputi

a. Kesiapsiagaan

b. Peringatan dini

c. Mitigasi bencana

2. Tanggap Darurat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pasa tanggap darurat meliputi :

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya meliputi :

a. Cakupan lokasi bencana;

b. Jumlah korban bencana;

c. Kerusakan prasarana dan sarana;

d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;

e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

2. Penentuan status keadaan darurat bencana, meliputi :

a. Pengerahan sumber daya manusia;

b. Pengerahan peralatan;

c. Pengerahan logistik;

d. Imigrasi, cukai, dan karantina;

e. Perizinan;

f. Pengadaan barang/jasa;

g. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;

h. Penyelamatan;

i. Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, meliputi :

a. Kegiatan pencarian

b. Kegiatan pertolongan

c. Kegiatan penyelamatan masyarakat

4. Pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi :

a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;

b. Pangan;

c. Sandang;

d. Pelayanan kesehatan;

e. Pelayanan psikososial; dan

f. Penampungan serta tempat hunian.

5. Perlindungan terhadap kelompok rentan.

a. Pemberian prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka

b. Penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial

6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

3. Pasca Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana terdiri atas:

1. Rehabilitasi meliputi :
   a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
   b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
   c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
   d. pemulihan sosial psikologis;
   e. Pelayanan kesehatan;
   f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
   g. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
   h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
   i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
   j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
2. Rekonstruksi, meliputi :
   a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
   b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
   c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
   d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
   e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
   f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

g. Peningkatan fungsi pelayanan publik;

h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

3.1.5 Instansi-Instansi Yang Terkait Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Wilayah Kecamatan Baleendah

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, buku pedoman penanggulangan bencana banjir 2007 dan BPBD Kabupaten Bandung, menjelaskan unsur teknis dari Dinas atau Badan yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana khususnya bencana banjir antara lain :

a. Dinas Kesehatan mempunyai tugas :
   1) Memberikan supervisi, bantuan teknis dan administrasi tentang penanganan kesehatan di lokasi bencana.
   2) Mencatat jumlah masyarakat/korban meninggal, luka-luka dan korban terserang penyakit akibat bencana.
   3) Melakukan upaya penanganan krisis kesehatan yang meliputi : pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan, Puskesmas, RS rujukan. dll.

b. Dinas Sosial mempunyai tugas :
   1) Menyiapkan bahan kebutuhan pokok sejak tahap kesiapsiagaan hingga tanggap darurat selesai.
   2) Mendistribusikan bahan kebutuhan pokok bagi korban bencana/pengungsi sampai dengan tanggap darurat selesai.

3) Mengupayakan tersedianya bahan kebutuhan pokok dari berbagai sumber.

c. Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

1) Memantau jalur-jalur transportasi yang terhambat akibat banjir dan melaksanakan upaya-upaya alternative transportasi.

2) Menyediakan sarana perhubungan guna membantu upaya penanganan bencana/ kedaruratan.

d. Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan mempunyai tugas :

1) Penyiapan jalur evakuasi dan lokasi penampungan sementara.

2) Penataan tata ruang wilayah di daerah rawan bencana.

e. Dinas Pekerjaan Umum Binamarga mempunyai tugas :

1) Menyediakan peta lokasi rawan banjir.

2) Menyediakan sarana dan prasarana pada tahap kesiapsiagaan dan penanganan bencana/kedaruratan hingga pemulihan darurat.

f. Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai tugas mengerahkan potensi sumberdaya (peralatan dan personil) TNI untuk melakukan penanganan bencana banjir, termasuk kemungkinan penggunaan helicopter untuk evakuasi dan distribusi bantuan, jika diperlukan.

g. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas mengendalikan situasi keamanan sejak kesiapsiagaan hingga tanggap darurat selesai.

h. Kecamatan Baleendah mempunyai tugas sebagai fasilitator dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjir.

i. Unsur Masyarakat yang dapat berperan serta dalam upaya penggulangan banjir sejak kesiapsiagaan sampai tanggap darurat selesai, antara lain : PMI (Palang Merah Indonesia), Pramuka, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini dilakukan dengan berinteraksi secara dekat dengan aparatur BPBD Kabupaten Bandung serta Masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir. Interaksi tersebut melalui wawancara, observasi partisipasi, studi dokumen yang berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir.

Penelitian kualitatif ini memberikan penjelasan mengenai tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat, kapan dan di mana ternyadinya. Sehingga penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai Kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

3.2.1 Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti ialah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap permasalahan, di sini peneliti menggambarkan beragai fenomena, semua kegiatan, keadaan, kejadian yang dipengaruhi oleh kinerja BPBD Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bancana banjir.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah Pengumpulan data yang dilengkapi seperti bahan-bahan dalam tulisan, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan pemanfaatan teknologi informasi atau internet dan literatur-literatur. Pengumpulan data tersebut yang berkaitan dengan kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Studi pustaka bertujuan untuk menjawab masalah-masalah penelitian menggunakan data sekunder atau kedua yang berhubungan dengan kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui kinerja BPBD Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir yang menjadi objek penelitian. Studi lapangan ini terdiri dari:

a. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan pengamatan langsung ke obyek penelitian dengan mengadakan pencatatan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.
b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber dari aparatur dan masyarakat yang mengetahui dan memahami lebih jauh

khususnya kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* adalah Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri informan yang memahami tentang Kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir dan masyarakat yang terkena dampak bencana banjir.

Adapun informan aparatur-aparatur yang menjadi sumber informan sebagai berikut :

1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung, dipilih karena khusus menangani dalam proses kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung, dipilih karena khusus menangani dalam persiapan kedaruratan dan logistik bagi penanganan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

3) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Bandung, dipilih karena khusus menangani dalam proses Rehabilitasi dan Rekontrusksi pasca bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

4) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bandung, dipilih karena merupakan salah satu istansi yang terkait menangani penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

5) TAGANA (Taruna Siaga Bencana) di Wilayah Kecamatan Baleendah, dipilih karena merupakan istansi yang terkait dalam menangani penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah.

Masyarakat yang menjadi informan adalah Masyarakat yang terkena dampak bencana banjir di Kabupaten Bandung sebagai berikut:

1) Warga Kampung Cieunteung, merupakan wilayah yang tiap tahun menjadi langganan banjir dengan kedalaman mencapai 3m

2) Warga Kampung Cigosol, merupakan wilayah sering terkena banjir, data terakhir banjir pada bulan April 2012

3) Warga di Kampung Jambatan, merupakan wilayah yang dekat dengan S. Citarum, dengan ketinggian air mencapai 170 cm

4) Warga di Kampung Kulalet, merupakan wilayah yang dekat dengan S. Cisangkuy, banjir terbesar pada Maret 2011 mencapai lebih dari 1m

5) Warga di Kampung Ciputat, merupakan wilayah dekat dengan S. Citarum yang juga sering terkena dampak banjir.

3.2.4 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, analisa data Kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berdasarkan pada pengumpulan data-data mengenai kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir. Reduksi data sebagai proses pemilihan atau penglasifikasian data-data yang didapat dari hasil wawancara bersama aparatur BPBD Kabupaten Bandung, Dinas Sosial Kabupaten Bandung, TAGANA Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, observasi di lapangan yakni di BPBD dan di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung serta tinjauan pustaka. Semua data tersebut dipilih dan yang digunakan sesuai yang berkaitan dengan kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir mulai dari prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana serta berkaitan dengan instansi-instansi pemerintah lainnya yang ada di Kabupaten Bandung.

Menyajian data yang telah tersusun sesuai dengan data dan hasil wawancana, observasi dan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir. Hasil tersebut di sangkutpautkan antara hasil

wawancara, observasi dan tinjauan pustaka yang selanjutnya menghasilkan sebuah laporan penelitian dan hasil dari penyajian data tersebut pada akhirnya akan menggambarkan sebuah kesimpulan.

Kesimpulan dihasilkan berdasarkan generalisasi dari pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan mengenai kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir. Hasil kesimpulan tersebut dapat menggambarkan bagaimana tingkat dari kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir yang ke depannya dapat memberikan masukan, perbaikan terhadap sektor-sektor yang kurang, sehingga bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah dapat diminimalisir atau dicegah.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Bandung Jalan Raya Soreang KM 17 Soreang 40912 dan masyarakat wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang terkena bencana banjir. Waktu penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Thn 2011	Tahun 2012						
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Studi Pustaka								
2	Observasi Awal								
3	Pengajuan Judul UP								
4	Pengajuan Surat Ijin								
5	Penyusunan UP								
6	Seminar UP								
7	Pelaksanaan Penelitian								
8	Pengumpulan Data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi								
9	Pengolahan data dan Analisis data								
10	Penulisan Skripsi								
11	Sidang Skripsi								